

ABSTRAK

Berawal dari adanya Pemilik Perusahaan Pers yang ikut merangkap sebagai Petinggi pada Partai Politik yang menimbulkan hasil produk jurnalistik tidak independen terutama ketika menjelang digelarnya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga muncul pula intervensi kepada para wartawan yang bekerja pada Perusahaan Pers tersebut yang tentu hal itu menciderai Kode Etik Jurnalistik yang seharusnya dalam bertugas para wartawan harus merdeka dari intervensi para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif yuridis yang artinya lebih menitikberatkan pada pengkajian masalah hukum pada persoalan norma. Objek kajian berupa bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian seperti buku dan juga bahan hukum tersier seperti kamus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan melakukan pendekatan secara perundang-undangan, konsep dan sejarah.

Dapat disimpulkan bahwa pada proses pendirian perusahaan pers di Indonesia saat ini sangatlah mudah sehingga semakin merebak. Namun kondisi itu tidak menjadi masalah seiring berkembangnya era kemerdekaan pers dan selama masih tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dalam bertugas. Banyaknya petinggi partai politik yang ikut melakukan komersialisasi pada perusahaan pers bertujuan agar dapat melancarkan visinya untuk memperoleh tujuan dan hasrat politiknya dengan menggunakan alat politik media. Belum adanya payung hukum yang melarang dengan tegas bagi petinggi parpol untuk memiliki perusahaan pers juga menjadi faktor kondisi tersebut. Sehingga diperlukan ada pembatasan bagi para petinggi parpol untuk tidak memiliki perusahaan pers agar dalam penyelenggaraan pemilu para perusahaan pers bisa independen dan menghasilkan produk jurnalistik yang berimbang.

Kata Kunci: Pers, Pemilihan Umum, Partai Politik

ABSTRACT

In the first existence of a press company owner who also doubles as a functionary officer in a political parties which result in an independent journalistic product, especially when approaching the holding of the election democracy party, so that intervention also arises for journalists who work for the Press Company which of course againts the journalistic ethic code which is supposed to be the duty of journalists that must be independent from the intervention of the parties.

The research method used in this research is a juridical normative which focuses more on finding the legal issues on norm issues. The study object is in the form of primary legal materials which include legislation, secondary legal materials such as research results, books and tertiary legal materials such as dictionary. The legal materials collection is done through literature study and approaching legislation, concept and history.

It can be concluded that nowadays in the process of establishing a press company in Indonesia is very easy so that it is getting widespread. However, this condition do not become a problem since the development of press freedom and as long as it was still subject to the journalistic ethic code of while on duty. The high number of political parties involved in commercializing press company is aimed at launching their vision to achieve their political goals and desires by using political media tools. The absence of a legal institution that strictly prohibits political party official from owning a press company is also a factor in this condition. Therefore, it is necessary to have restrictions on political party official not to have a press company so that in holding elections the press companies can be independent and produce a balanced journalistic product.

Keywords : pers, general election. political parties

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayah-nya, penyusunan Skripsi Hukum yang berjudul “PENGATURAN PERS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM) ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi Hukum ini banyak mengalami kendala namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari dosen atau berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Hukum ini.
2. Kedua orang tua tercinta penulis Ibu Fatimah dan Bapak Moh. Jaelani dan Saudara-saudara tercinta Adik saya Elja Azzura dan Deniz Terengganu beserta Nenek yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil demi terselesainya kuliah dan Penelitian Skripsi Hukum ini.
3. Dosen pembimbing penulis Bapak Fauzin, S.H., LL.M yang telah membimbing penulis mulai dari tahapan pengajuan hingga sampai Skripsi Hukum ini selesai.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.
5. Dosen penguji

6. Serta seluruh jajaran dosen dan TU di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik dan membantu penulis serta memberikan pengarahan dari penulis masih semester awal hingga penulis menyelesaikan Skripsi Hukum ini.
7. Kepada Tunangan saya Chintia Anita Dewi yang tidak pernah bosan untuk memberi semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi Hukum ini.
8. Sahabat seperjuangan Ilham Julianto Putra S.H, Dasuki S.H, Andre Maulana dan Syaiful bahri yang menemani perjalanan skripsi saya serta memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi Hukum ini.
9. Kepada saudara saya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Cabang Bangkalan yang saling memberikan support dan semangat.
10. Kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016
11. Kepada rekan-rekan KKN 26 UTM Yuni, Alifia, Tiwi, Nada, Claerika, Ririn, Izah, Isti, Mesky, Maya, Dasuki, Mashudi, Ardian dan Romi
12. Kepada rekan kerja BEM FH UTM, HIMASA UTM dan HMK PEMERINTAHAN FH UTM yang telah memberikan keluarga baru serta pengalaman dalam berorganisasi.
13. Kepada rekan kerja di PT Jurnalmojo Media Siber terutama Bapak Direktur Mujiono S.H serta teman-teman satu tim Tenaga Ahli Kemediiaan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Husaini, Oliv, Abi dan Barqie serta pimpinan yang telah memberikan waktu dan semangat untuk menyelesaikan skripsi hukum ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi Hukum ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi Hukum ini.

Bangkalan, 25 April 2020

Deaz Terengganu
160111100001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Permasalahan	10
1.3 Tujuan	11
1.4 Kegunaan	11
1.4 Kegunaan Teoritis	11
1.4 Kegunaan Praktis	11
1.5 Keaslian	12
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.1 Pendekatan Penelitian	13
1.6.1 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.1 Analisis Bahan Hukum	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA PEMBATAHAN KEPEMILIKAN USAHA PERS BAGI PETINGGI POLITIK	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pers	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Partai Politik	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum	28
2.3 Tinjauan Teori	30
2.3.1 Teori Keadilan	30
2.3.2 Teori Politik Hukum	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KEPEMILIKAN USAHA PERS OLEH PETINGGI PARTAI POLITIK	36
3.1 Kepemilikan Usaha Pers Bagi Partai Politik	36
3.2 Kepemilikan Usaha Pers Bagi Petinggi Partai Politik	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	60
4.1 Kesimpulan	60

4.2 Saran	60
Daftar Pustaka.....	61
Biodata Penulis	